

SINERGITAS ANTARLEMBAGA PEMERINTAH DALAM SETAHUN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – MA'RUF AMIN

Sidiq Budi Sejati dan Anin Dhita Kiky Amrynudin

Abstrak

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) telah memasuki tahun pertama pemerintahan pada 20 Oktober 2020. Sinergitas antarlembaga pemerintah sudah menjadi sorotan publik sejak awal Kabinet Indonesia Maju terbentuk. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini menjadi tantangan yang besar bagi jalannya pemerintahan. Tulisan singkat ini menjelaskan permasalahan yang mempengaruhi sinergitas antarlembaga pemerintah dan upaya perbaikan untuk mewujudkan sinergitas antarlembaga pemerintah yang lebih baik di masa depan. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi serta mempercepat pembangunan integrasi data di Indonesia agar komunikasi antarlembaga pemerintah dapat berjalan lebih komprehensif dan efektif. Selain itu, melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur di bidang teknologi dan informasi, khususnya terkait tata kelola teknologi informasi pemerintah yang terintegrasi (big data) untuk mewujudkan e-government.

Pendahuluan

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) telah memasuki tahun pertama pemerintahan pada 20 Oktober 2020. Berbagai persoalan dan tantangan dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjadi sorotan publik. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini menjadi tantangan yang besar bagi pemerintahan untuk fokus dalam penanganannya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

berpendapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus utama dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yaitu pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi belum memperlihatkan hasil yang optimal, kecuali bidang infrastruktur (kabar24.bisnis.com, 20 Oktober 2020). Selain itu, hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan beberapa persoalan yang menjadi sorotan selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. *Pertama,*



persoalan kebebasan berpendapat, mendapat sorotan terbanyak yaitu sebesar 33,5%. *Kedua*, mengenai pembentukan Undang-Undang mendapat sorotan sebesar 20,6%. *Ketiga*, persoalan sinergi lembaga pemerintah mendapat sorotan sebesar 15,5%. *Keempat*, konflik antarkelompok mendapat sorotan sebesar 10,2%. *Kelima*, keamanan di perbatasan negara mendapat sorotan sebesar 9,6%. *Keenam*, gerakan separatis dan terorisme mendapat sorotan sebesar 3,4% dan sebesar 7,25% menyatakan tidak tahu (kompas.com, 20 Oktober 2020).

Salah satu persoalan yang disoroti dari hasil survei tersebut yaitu mengenai sinergi lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah yang dimaksud yaitu kementerian/lembaga negara, dan lembaga pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah. Persoalan ini telah lama disoroti bahkan sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Beberapa pernyataan dan kebijakan yang diambil oleh beberapa lembaga pemerintah tersebut seringkali tumpang tindih dan tidak selaras sehingga menimbulkan kegaduhan. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat yang akhirnya dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, tulisan ini ingin menjawab terkait permasalahan yang mempengaruhi sinergitas antarlembaga pemerintah dan upaya perbaikan untuk mewujudkan sinergitas antarlembaga pemerintah yang lebih baik di masa depan.

Permasalahan Sinergitas Antarlembaga Pemerintah

Persoalan sinergitas antarlembaga pemerintah tidak dapat lepas dari upaya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan lembaga pemerintah

dalam setiap kebijakan. Hal ini karena koordinasi pemerintah menjadi faktor dominan berhasil tidaknya pemerintah menjalankan fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan (Febrian, 2015: 9). Permasalahan koordinasi dan komunikasi dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terjadi pada beberapa keputusan pemerintah dan tanggapan pejabat di kementerian/ lembaga. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain kasus perbedaan data pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dalam formulir A-KWK antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Jawa Tengah menganggap KPU tidak transparan dalam memberikan data pemilih di formulir A-KWK (solopos.com, 16 Juli 2020). Kasus lainnya terkait kisruh gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Adapun pendapat yang dikeluarkan oleh BPK dan Kementerian Keuangan saling bertentangan terkait imbas dari gagal bayar yang dapat berpengaruh secara sistemik (republika.co.id, 15 Januari 2020). Hal ini tentunya menimbulkan kontroversi publik dan rasa ketidakpastian bagi nasabah. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan belum adanya koordinasi yang baik antarlembaga pemerintah yang dapat menghambat sinergitas dan kinerja lembaga pemerintahan.

Presiden Jokowi selalu menegaskan dalam berbagai kesempatan agar kementerian/ lembaga dapat bekerja sama untuk melakukan terobosan-terobosan yang dapat dilihat oleh masyarakat serta menghilangkan ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan, dan tidak berjalan sendiri-sendiri (kompas.com, 29 Juni 2020). Beberapa permasalahan yang mempengaruhi terwujudnya sinergitas

antarlembaga pemerintah antara lain: *Pertama*, struktur hirarki yang kuat menyebabkan hubungan birokrasi pemerintah terhadap pelayanan publik sering sekali mengecewakan dan berbelit-belit. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi sehingga terjadilah ego sektoral. Ego sektoral dapat diredam dengan menumbuhkan kesadaran akan tujuan bersama (Febrian, 2015: 47-48).

Kedua, bias informasi yang pada akhirnya membingungkan pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Bias informasi terlihat pada berbagai kebijakan yang diambil pemerintah sehingga memunculkan beragam pendapat seperti pada saat menetapkan penerapan karantina kewilayahan ketika wabah Covid-19 sudah terlanjur masuk dan mulai merebak di Indonesia. Pada akhirnya pemerintah lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) daripada melakukan karantina wilayah dalam menanggapi status darurat kesehatan. Kemudian yang *ketiga*, panjangnya rantai komunikasi yang membuat pengambilan kebijakan di tingkat daerah lambat seperti pada penerapan PSBB di daerah yang dianggap terlalu prosedural dan rumit, dimana saat itu persetujuan harus melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang harus dikomunikasikan dan disetujui terlebih dahulu oleh Menteri Kesehatan (kompas.com, 24 April 2020). Hal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan akhirnya banyak pemerintah daerah yang melakukan inisiatif sendiri dengan menerapkan PSBB bahkan *lockdown* di wilayahnya untuk menjaga warganya dari penularan Covid-19.

Upaya Perbaikan yang Dapat Dilakukan

Permasalahan yang mempengaruhi terwujudnya sinergitas antarlembaga

pemerintah dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan kinerja pada pemerintahan Jokowi-Ma'rif 4 (empat) tahun mendatang. Upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain: *Pertama*, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan melakukan perampingan birokrasi yang diharapkan dapat mempersingkat panjangnya struktur hirarki yang menghambat sinergitas antarlembaga pemerintah. *Kedua*, melakukan perbaikan dari sisi tata kelola komunikasi pemerintah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan peluang bagi pemerintah untuk menggunakan media komunikasi yang berbasis teknologi serta disertai pengambilan data yang bersumber dalam satu sistem yang saling terintegrasi (*big data*). Permasalahan data ini telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Namun "satu data" yang dimaksud disini yaitu menggabungkan data parsial dari masing-masing lembaga ke dalam satu wadah, sehingga masih bersifat konsolidasi namun belum terintegrasi secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model, kebijakan, standar dan aturan mengenai pengumpulan data yang dikemas dalam bentuk arsitektur data dan diharapkan bisa menjadi solusi integrasi data dalam Satu Data Indonesia (data.go.id, 9 September 2020).

Ketiga, perlunya *crisis leader* atau pemimpin yang dibutuhkan pada saat krisis yang memiliki karakteristik kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah model kepemimpinan dimana seorang pemimpin lebih cenderung memberikan arahan pada bawahannya dan memberi

insentif serta hukuman pada kinerja bawahan. Gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada peran pengawasan organisasi dan kinerja kelompok, sehingga kepemimpinan ini sangat efektif dalam situasi krisis dan darurat (Riyanti, 2017:1). *Crisis leader* dibutuhkan sebagai sosok yang mampu memberikan perlindungan dan arahan yang strategis dalam penanggulangan krisis. Sosok *crisis leader* perlu memiliki karakteristik kepemimpinan transaksional yang memiliki artikulasi baik dalam berkomunikasi serta tegas dalam memberikan *reward and punishment* terhadap bawahannya. Menurut *Federal Emergency Management Agency* (FEMA) pengelolaan aktivitas pada saat krisis disebut juga dengan istilah *managing in the edge of darkness* karena banyak parameter dan informasi yang belum diketahui sehingga meningkatkan aspek ketidakpastian. Oleh karena itu, FEMA menyatakan diperlukan seorang *crisis leader* yang pragmatis, cepat bereaksi terhadap perubahan (*responsive*), tegas dalam menerapkan *compliance* termasuk untuk jadwal (*schedule*) melalui skema *performance management (reward and consequence)*, dan mempunyai artikulasi yang baik dalam menyampaikan komunikasi (Utomo dan Hanita, 2020).

Namun demikian, berlawanan dengan kriteria kepemimpinan FEMA tersebut, saat ini Presiden Jokowi justru mengeluarkan kebijakan dengan memberikan diskon 30% untuk mendorong pariwisata di Indonesia demi mengatasi penurunan jumlah wisatawan usai mewabahnya Covid-19 (news.detik.com, 17 Februari 2020). Keputusan Presiden tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang *responsive* dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Sementara Covid-19 mulai menyebar luas di

berbagai daerah di Indonesia, birokrasi masih terganggu dengan perubahan kondisi yang serba tidak pasti. Ditambah tidak adanya *extraordinary performance* dari para menteri dan ego sektoral yang masih tinggi yang pada akhirnya presiden mulai menunjukkan ketegasannya dalam *compliance of schedule* melalui kemarahan kepada para anggota kabinet dan mengancam akan melakukan *reshuffle* pada Kabinet Indonesia Maju. Namun hal ini tidak kunjung terjadi sehingga untuk indikator *performance management (reward and consequence)* belum terlihat karena sanksi yang diberikan dalam memenuhi capaian kinerja belum juga diterapkan.

Penutup

Sinergitas antarlembaga pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang berdampak pada pelayanan publik. Pemerintah perlu memiliki rantai komando dalam bentuk pedoman terkait komunikasi pemerintah untuk memperbaiki beberapa permasalahan seperti struktur hirarki yang kuat serta panjangnya rantai komunikasi yang menyebabkan adanya bias informasi. Pedoman tersebut diharapkan dapat digunakan baik pada masa krisis maupun normal, sehingga terdapat jalur birokrasi yang jelas kapan informasi tersebut dapat diberikan kepada publik. Selain itu kemampuan pemimpin sebagai *crisis leader* perlu ditingkatkan agar dapat mengevaluasi kinerja lembaganya secara cepat untuk merespons capaian pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi agar komunikasi antarlembaga pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

DPR RI juga dapat mendorong pemerintah untuk mempercepat integrasi data di Indonesia dengan cara menyelesaikan rancangan arsitektur data pada sistem portal "Satu Data Indonesia". Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dibidang teknologi dan informasi terutama terkait teknologi tata kelola data pemerintah yang terintegrasi (*big data*) untuk mewujudkan *e-government*.

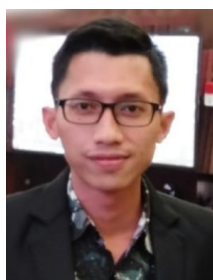
Referensi

- "Beda Pendapat Antara BPK dan Kemenkeu di Kasus Jiwasraya", 15 Januari 2020, <https://republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/20/01/15/q455fo409-beda-pendapat-antara-bpk-dan-kemenkeu-di-kasus-jiwasraya>, diakses 10 November 2020.
- Febrian, Ranggi Ade. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis). *WEDANA Jurnal Kajian Pemerintahan Politik dan Birokrasi*. Vol.1 No.1 (2015): April, <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1616>, diakses 1 November 2020.
- "Gaduh, Bawaslu & KPU Jateng Saling Serang Soal Data Pemilih Pilkada 2020", 16 Juli 2020, <https://m.solopos.com/gaduh-bawaslu-kpu-jateng-saling-serang-soal-data-pemilih-pilkada-2020-1071146>, diakses 9 November 2020.
- "Genjot Pariwisata di Tengah Corona, Jokowi Beri Turis Diskon", 17 Februari 2020, [https://news.detik.com/berita/d-4903193/genjot-pariwisata-di-tengah-](https://news.detik.com/berita/d-4903193/genjot-pariwisata-di-tengah-corona-)
- [corona-](https://news.detik.com/berita/d-4903193/genjot-pariwisata-di-tengah-corona-), diakses 1 November 2020.
- "Komunikasi Buruk Kabinet Jokowi Yang Tak Pernah Usai", 14 Maret 2020, <https://amp.lokadata.id/amp/komunikasi-buruk-kabinet-jokowi-yang-tak-pernah-usai>, diakses 9 November 2020.
- "Presiden Jokowi Minta Tak Ada Lagi Ego Sektoral dalam Tangani Pandemi", 29 Juni 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/11471051/presiden-jokowi-minta-tak-ada-lagi-ego-sektoral-dalam-tangani-pandemi>, diakses 31 Oktober 2020.
- "Rapat Pembahasan Rancangan Arsitektur Data Satu Data Indonesia", 9 September 2020, <https://data.go.id/berita/rapat-pembahasan-rancangan-arsitektur-data-satu-data-indonesia>, diakses 10 November 2020.
- Riyanti, Siska. (2017). Pengaruh kepemimpinan Transaksional dan Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Enseval Mega Trading Tbk Cabang Bandar Lampung. <http://repo.darmajaya.ac.id/id/eprint/197>, diakses 9 November 2020.
- "Setahun Kinerja Jokowi-Ma'ruf, Apa Kabar Lima Sektor Prioritas?", 20 Oktober 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201020/15/1307492/setahun-kinerja-jokowi-maruf-apa-kabar-lima-sektor-prioritas>, diakses 9 November 2020.
- "Survei Litbang Kompas Soal Setahun Jokowi - Ma'ruf: Pemberantasan KKN Mendesak Diselesaikan", 20 Oktober 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/14242181/>

survei-litbang-kompas-soal-setahun-jokowi-maruf-pemberantasan-kkn-mendesak , diakses 1 November 2020.

“Tiga Salah Kaprah Penerapan PSBB di Indonesia dan Solusinya”, 24 April 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/24/183327323/3-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dan-solusinya?page=all>, diakses 1 November 2020.

Utomo, Doni Wino Fajar dan Margaretha Hanita. (2020). “Strategi Kepemimpinan Krisis Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 Untuk Memastikan Ketahanan Nasional” *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Volume 8 Nomor 2, <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/83/87/>, diakses 1 November 2020.



Sidiq Budi Sejati
sidiq.sejati@dpr.go.id



Anin Dhita Kiky Amrynudin
anin.amrynudin@dpr.go.id

Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP., lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P., M.Si, lahir di Tegal, 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan Pendidikan S2 Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.